

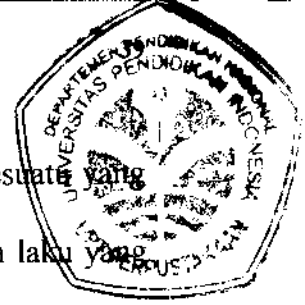
## BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

### A. Konsep Kedisiplinan.

#### 1. Pengertian Disiplin

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Inggris “discipline” yang artinya pengikut atau penganut. Dari pengertian diatas kata disiplin berarti ketaatan dari seseorang kepada pemimpinnya. Maksud pemimpin dalam ungkapan di atas tergantung pada konteks atau situasi. Kalau di dalam keluarga pemimpin itu ialah orang tua, di sekolah ialah kepala sekolah dan guru-guru. Dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikarang oleh W.J.S. Poerwadarminta (1989 : 11) terdapat dua pengertian dari kata disiplin; yaitu latihan batin dan bakat dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu taat kepada tata tertib, pengertian lain yaitu ketaatan pada aturan tata tertib.

Disiplin berasal dari Bahasa Latin (*discipline*) artinya mengajarkan sesuatu yang bersifat positif dan konstruktif (Pearce J, 1990 : 4 ). Berdasarkan pengertian di atas seseorang yang disiplin adalah orang yang selalu belajar dan selalu taat pada pemimpin. Daeng P. Dini (1996 : 1) menyatakan pemimpin yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah guru atau orang tua yang berkewajiban mengajar anak didiknya tentang perilaku moral yang sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan. Kedua pendapat di atas senada dengan yang dikemukakan oleh Dodson (1996 : 1 ) bahwa disiplin sebenarnya adalah mengajar. Bila orang tua sedang mendisiplinkan anak-anaknya itu adalah sedang mengajar. Hal tersebut mengandung dua makna yaitu melakukan perbuatan baik dan menghindari



perbuatan tidak baik. Sering kali anak tidak pernah merasa bahwa sesuatu yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya sejak kecil agar ia bertingkah laku yang baik adalah pengajaran disiplin. Karena itu disiplin diartikan sebagai proses mengajar yang berlangsung secara terus menerus. Menurut Aristoteles disiplin itu tidak lain adalah habituasi. Dalam kaitan ini pengertian membiasakan diri merupakan cara-cara menuju disiplin sedangkan tujuan akhir (ends) adalah menanamkan kesadaran diri akan disiplin.

Menurut Hidayat (1999 : 35) disiplin merupakan perilaku yang dikehendaki oleh masyarakat beradab. Secara moral ia merupakan rangkaian perilaku yang selalu baik dan secara operasional menunjuk pada perilaku yang memiliki ciri tertib, ajeg, dan normatif.

Kedisiplinan atau perilaku disiplin merupakan salah satu perilaku perolehan yang sangat penting sepanjang hidup manusia, dengan alasan karena :a) disiplin dianggap sebagai perilaku dasar atau suatu prasarat sebagai pendukung kesuksesan belajar atau bekerja, b) kedisiplinan menawarkan gaya bertindak atau berperilaku efektif dalam berbagai kondisi dan sekaligus menjadi tuntutan bagi sumber daya manusia yang berkualitas pada era globalisasi.

Pendidikan Umum bertujuan untuk mengarahkan atau membina manusia menjadi warga negara yang baik (good citizen) dan manusia terdidik (well educated man). Salah satu ciri warga negara yang baik adalah berdisiplin (R. Freeman Butts, 1980 : 151).

Disiplin merupakan modal utama dalam hidup manusia. Orang yang hidupnya disiplin akan teratur, kreatif, memiliki etos kerja dan semangat juang

dalam hidupnya. Insan yang berpendidikan diharapkan menjadi agen pembangunan dan pembaharu yang mampu melaksanakan mobilisasi, sosialisasi, dan aktualisasi (James S. Coleman, 1965 : 95).

Disiplin merupakan aspek kepribadian, merupakan salah satu motif untuk dapat hidup teratur (need for order), motif untuk berprestasi (need for endurance). Hal tersebut merupakan ciri dari orang yang berkualitas (M. Djawad Dahlan, 1982 : 182).

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam disiplin, seperti yang dikemukakan oleh Lindgren (1960 : 305) sebagai berikut :

- a. Punishmen/hukuman.  
Hal ini berarti anak perlu dihukum bila bersalah. Namun hukuman tersebut yang bersifat mendidik. Siswa yang terlambat datang ke sekolah disuruh membersihkan WC.
- b. Control by enforcing obedience or orderly conduct. Disiplin siswa memerlukan kontrol, arahan, dan bimbingan.
- c. Training that correct and strengthens. Implikasi dari makna ini adalah tujuan dari disiplin itu ialah disiplin diri, memberi latihan kepada individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan pengajaran dan kontrolnya sendiri.

Menurut Victor M. Situmorang dan Yusuf Sahir (1993 : 177) disiplin adalah “ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada putusan perintah atau peraturan yang berlaku”

Senada dengan pengertian di atas, disiplin dalam Gerakan Disiplin Nasional yang dikemukakan oleh D. Sumarmo (1996 : 29), adalah sebagai berikut Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas

lahir batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Darji Darmodihardjo (1992 : 10) mengemukakan pengertian disiplin adalah “sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab”.

Sedangkan Soegeng Prijodarminto (1992 : 23) mengemukakan aspek-aspek yang terdapat dalam disiplin, yaitu :

- a. Sikap mental (mental attitude) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak.
- b. Pemahaman yang baik mengenai perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman akan menumbuhkan pengertian bahwa ketaatan merupakan syarat mutlak dalam mencapai sukses.
- c. Sikap dan kelakuan yang wajar dengan menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati aturan secara cermat dan tertib.

Elizabeth Hurlock (1972) mengemukakan bahwa ada tiga hal yang menjadi esensi dalam disiplin, aturan atau norma, konsistensi, dan hukuman (sanksi). Dari ketiga esensi tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, yang satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan.

- a. Esensi aturan atau norma.

Berfungsi untuk mengarahkan seseorang kepada keteraturan hidup yang dapat diterima oleh kelompok. Norma atau aturan tersebut mengikat kepada siapapun yang ada didalamnya. Apabila seseorang tidak mengikuti aturan atau norma yang berlaku dalam suatu kelompok, maka ia akan bertindak semaunya

tanpa menghiraukan aturan tersebut, hal ini akan menyebabkan perhatian kelompok pada orang tersebut dan akan dikucilkan dari kelompoknya.

b. Esensi konsistensi.

Berfungsi untuk menanamkan keteguhan dalam memegang prinsip kepada seseorang. Tanpa konsisten disiplin itu akan naik turun dalam arti perilaku seseorang kadang-kadang baik sesuai dengan aturan atau norma atau sebaliknya.

c. Esensi Sanksi atau hukuman/hadiah.

Hukuman berfungsi untuk menghalangi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, sedangkan hadiah berfungsi untuk memotivasi atau mendorong agar seseorang berbuat dan bertindak sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut Elizabeth Hurlock (1956 : 417-418) mengatakan bahwa pada dasarnya disiplin terdiri dari dua macam ; yaitu disiplin positif (positive discipline) dan disiplin negatif (negative discipline). Disiplin positif identik dengan disiplin diri (self discipline) yang mengarah dari motivasi diri sendiri, dimana dalam melakukan sesuatu (mentaati aturan atau norma) itu harus datang dari kesadaran diri sendiri. Sedangkan disiplin negatif yaitu perilaku disiplin yang dikondisikan oleh pihak luar, kadang-kadang perilaku disiplin ini dilaksanakan secara terpaksa. Kedua disiplin ini akhirnya erat kaitannya dengan perilaku seseorang dalam hidupnya di masyarakat.

Manakala peraturan atau norma itu telah menjadi mempribadi (milik individu) dalam arti telah memahami, menghayati, dan menjadikan norma itu

sebagai pedoman perilakunya, berarti ia telah mampu menyerap dan menginternalisasikan nilai disiplin, dengan kata lain memiliki disiplin diri. Disiplin diri sebagai perilaku yang bertanggung jawab dan lahir didasarkan kepada kesadaran diri atau pertimbangan hati nurani. Dalam hal ini Utami Munandar (1988 : 2) mengartikan disiplin diri sebagai “kesadaran diri untuk mentaati nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam lingkungannya”.

Anshar Sunyoto (1988 : 3) menggambarkan sifat-sifat orang yang berdisiplin diri adalah sebagai berikut :

“Orang yang taat dan sadar terhadap nilai, norma, aturan, dan tata tertib yang berlaku adalah orang yang dapat menerima kebenaran, kebaikan, dan kepentingan nilai, norma, aturan, dan tata tertib tersebut, orang demikian diketahui berdisiplin diri, ketaatannya tidak dipaksakan oleh orang lain”.

Sifat tulus atau merasa tidak terpaksa dalam melakukan suatu aktivitas atau mentaati suatu norma yang berlaku merupakan ciri kematangan pribadi seseorang. Senada dengan pernyataan di atas Schneiders (1960 : 234) mengemukakan bahwa “self discipline, therefore is not only the basic of maturity and adjustment but of the feeling and acceptance of responsibility for self”. Disiplin diri itu bukan hanya sebagai dasar kematangan dan penyesuaian diri, akan tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin, yaitu a) disiplin merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam berbagai aktivitas yang dilakukan, sebab tanpa disiplin segala kegiatan yang dilakukan tidak akan berhasil sesuai



dengan harapan, b) sumber utama disiplin berasal dari dalam diri sendiri, melalui hati nurani yang tulus dan ikhlas dalam mentaati aturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, c) dalam pelaksanaannya disiplin memerlukan bimbingan atau kontrol dari pihak lain, seperti orang tua terhadap anaknya, guru terhadap siswanya.

## **2. Beberapa Teori dalam Pendekatan Disiplin Siswa.**

Terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam membina disiplin siswa di sekolah, seperti yang dikemukakan oleh Power (1982 : 340-341) bahwa teori-teori disiplin di sekolah meliputi : theory of no control, theory of strict control, theory of value clarification, theory of moral behavior and theory of behavioral modification.

Teori peniadaan kontrol (theory of no control) dalam pembinaan disiplin siswa di sekolah menyatakan bahwa anak memiliki kemampuan sendiri dalam menuntun dirinya tanpa kontrol dari orang lain. Dalam hal ini anak bebas menentukan sendiri perilaku yang akan dilaksanakan. Sebagai lawan dari teori ini yaitu teori control (theory of strict control) yang keras dan biasanya disertai dengan modifikasi.

Teori klarifikasi nilai (theory of value clarification) dalam membina disiplin siswa di sekolah adalah teori yang mengajarkan para siswa melalui stimulus pengajaran untuk melakukan klarifikasi atau pengungkapan dan reasoning nilai moral yang termuat, baik nilai moral objektif maupun subjektif.

Teori perilaku moral yang menyatakan bahwa perilaku dapat dipelajari dan disiplin berdimensi kognitif. Disiplin akan berhasil kalau didukung oleh iklim yang kondusif untuk pengajaran. Teori perkembangan moral Kohlberg memusatkan pada pertimbangan moral yang tujuan akhirnya adalah perkembangan sistem nilai moral pribadi. Sedangkan teori modifikasi perilaku dalam membina disiplin siswa didasarkan atas asumsi bahwa semua perilaku manusia dihasilkan dari conditioning dan reinforcement.

Dari berbagai teori pembinaan disiplin sekolah, tidak ada satupun teori yang mutlak dijadikan sebagai dasar kebijakan pendidikan. Menurut Power (1982 : 340) yang memberikan arahan-arahan mutlak dalam menangani masalah disiplin. Namun paling tidak teori-teori tersebut memberikan beberapa alternatif untuk dipertimbangkan, walaupun tidak menyatakan tentang teori apa yang harus diikuti. Tetapi jika suatu sekolah mempunyai komitmen dalam membina disiplin siswa seperti mentaati tata tertib sekolah, guru tentu dalam menerapkan teori disiplin memiliki salah satu atau mengkombinasikan dari teori-teori pembinaan disiplin siswa di sekolah.

Pendekatan lain dalam pembinaan disiplin, khususnya disiplin kelas adalah pendekatan yang bersifat kontinum antara behavior modification approach, assertive discipline approach, and psychoanalytic approach (Kourilsky dan Quaranta, 1987 : 31). Dalam pelaksanaannya guru menyeleksi dan melaksanakan pendekatan itu sesuai dengan gaya pribadi dan pandangan guru terhadap masalah disiplin



Pendekatan behavior modification memfokuskan pada pembentukan perilaku yang dilakukan melalui berbagai bentuk reinforcement. Dengan demikian perilaku disiplin dibentuk oleh konsekuensi-konsekuensi dari perilaku itu sendiri. Pada waktu reinforcer (guru) mendukung perilaku disiplin siswa, maka perilaku tersebut cenderung diulang. Sedangkan punishment dan negative reinforcement cenderung melemahkan perilaku atau meniadakan perilaku indisipliner. Misalnya ketika seorang siswa menunjukkan perilaku rajin dan tekun dalam belajar, maka ia akan diberi pujian berupa kepercayaan. Kepercayaan tersebut berdampak pada diri siswa akan semakin rajin dan tekun dalam belajar. Sebaliknya ketika seorang siswa melakukan pelanggaran (indisipliner) tata tertib sekolah, seperti datang terlambat atau baju tidak dimasukkan, maka siswa tersebut diberi sanksi yang tujuannya agar perbuatan indisipliner tersebut tidak terulang lagi.

Menurut Kourilsky dan Quaranta (1987) teknik-teknik behavior modification tampak lebih efektif ketika diterapkan pada perilaku bukan belajar di dalam kelas, misalnya berkurangnya perilaku salah, seperti keluar tanpa permissi. Faktor kunci dari pendekatan ini adalah menekankan pada extinsic reward.

Pendekatan assertive discipline menekankan pada disiplin yang tegas. Guru dianjurkan bersikap tegas, sehingga memunculkan rasa tanggung jawab pada diri siswa terhadap perilakunya, sebab siswa diharapkan menyadari konsekuensi-konsekuensi negatif maupun positif yang diakibatkan dari perilaku tersebut. Konsekuensi negatif akan menghilangkan hak-hak istimewa atau pelayanan yang ditawarkan sekolah. Sedangkan konsekuensi positif akan menghasilkan sebuah penghargaan atau reward. Misalnya ketegasan guru dalam

memberikan hukuman kepada siswa seperti harus membuat soal sebanyak 50 butir, pada hakekatnya diarahkan untuk mengubah perilaku siswa kearah yang lebih baik.

Pelaksanaan teknik pendekatan assertive discipline akan lebih efektif apabila guru mengkomunikasikan konsep-konsep disiplin yang dikehendaki secara jelas dan diterapkan secara konsisten dalam sebuah sistem. Kalau siswa telah merasa jelas tentang perilaku yang diharapkan, maka secara aktif hal tersebut menjadi aturan perilaku pada kelompoknya. Tapi akan menjadi kurang efektif bila guru bersifat spontan tanpa diikuti prosedur yang konsisten, karena siswa tidak akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pendekatan assertive discipline ini.

Manakala guru berusaha keras mencari apa yang menjadi penyebab misbehavior siswa, maka guru demikian telah melakukan pendekatan psychoanalytic. Dengan cara itu guru mencoba mencari dan menemukan motivasi dari sikap-sikap dasar yang mempengaruhi perilaku siswa dan menemukan pula karakteristik-karakteristik emosional, sosial, dan psikologis yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Guru berarti lebih berperan sebagai konselor dari pada membuat aturan atau memberi reward. Tujuan umum dari pendekatan psychoanalytic adalah membantu siswa dalam memperoleh insight pola-pola perilaku kognitif. Misalnya seorang guru Bimbingan dan Penyuluhan yang memanggil siswa untuk diminta keterangan tentang ketidakhadirannya yang tanpa alasan, pada hakekatnya berusaha untuk mencari dan memahami penyebab misbehavior siswa tersebut.



Dari berbagai pendekatan dalam memandang disiplin memperlihatkan bahwa pendekatan behavior modification adalah pendekatan yang paling tegas dalam mendisiplinkan perilaku siswa melalui reinforcement yang bersifat positif (reward) maupun negatif (punishment). Pendekatan psychoanalytic dapat dianggap paling lunak, sebab dalam mengupayakan perilaku disiplin siswa, pendekatan ini melakukannya melalui pengenalan maupun pencarian penyebab perilaku siswa. Sedangkan pendekatan assertive discipline bisa dikatakan berada diantara pendekatan behavior modification dengan pendekatan psychoanalytic. Pendekatan ini pada satu sisi menghendaki ketegasan guru dalam mendisiplinkan perilaku siswa melalui komitmen-komitmen antara guru dengan siswa, dan secara konsisten harus ditaati oleh kedua belah pihak. Disisi lain guru berusaha untuk menumbuhkan self discipline siswa.

### **3. Proses Penanaman Disiplin dalam Pendidikan oleh Guru.**

Sebagai pendidik, guru memiliki peranan penting dalam mengembangkan disiplin siswa, melalui penanaman disiplin, misalnya dengan menciptakan proses belajar mengajar yang dapat mendorong siswa agar bertindak disiplin dalam mengikuti pelajaran. Pada dasarnya dalam mendisiplinkan siswa harus terfokus pada tujuan pendidikan umum, seperti yang dikemukakan oleh Henry (1952 : 73) yaitu "to develop and improve moral character" (membentuk dan memperbaiki karakter moral).

Ciri utama pendidikan adalah upaya membentuk manusia yang belum dewasa kearah kedewasaan secara normatif. Dengan demikian seorang pendidik

seyogyanya memahami sifat-sifat manusia, termasuk anak didik, agar dalam melakukan pendidikan tidak terlepas dari sifat dan karakter manusia itu sendiri. Sifat-sifat anak didik yang harus dipahami oleh pendidik (guru) seperti dikemukakan oleh Philip H. Phenix (1964 : 17) sebagai berikut :

Since education is a means of helping human being to become what they can and should become, the educator needs to understand human nature. He needs to understand people in their actualities, in their possibilities, and in their idealities. He must also know how to foster desirable change in them.

Pendidikan merupakan alat bantu bagi manusia untuk mencapai apa yang dicita-citakannya, maka pendidik perlu memahami sifat-sifat manusia atau siswa yang dididiknya, harus memahami aktualitas (keadaan) manusia sebenarnya, kemungkinan dan ide-ide, dan harus tahu bagaimana membantu perkembangan perubahan yang diinginkan dalam diri mereka.

Dalam membina perilaku disiplin, seperti yang dikemukakan oleh Philip H. Phenix sebagai berikut :

Pendidikan umum membina pribadi yang utuh yang trampil berbicara, menggunakan simbol dan isyarat yang sedang yang secara faktual diinformasikan dengan baik, mampu berkreasi dan menghargai hal-hal yang secara meyakinkan memenuhi keindahan, ditunjang oleh kehidupan yang berharap penuh disiplin dalam hubungan pribadi dengan pihak lain, memiliki kemampuan membuat keputusan yang bijaksana dan menentukan antara yang betul dan yang salah, serta memiliki wawasan yang integral. Pokoknya Pendidikan Umum wajib membina pribadi-pribadi yang seimbang yang memiliki kemampuan dan wawasan yang luas tentang kehidupan (Nursid Sumaatmadja, 1990 : 6).

Sedangkan menurut Gordon (M. Djawad Dahlan, 1982 : 27-28) mengelompokkan tugas dan pekerjaan guru menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Guru sebagai “pekerja kelompok” yang menciptakan suasana belajar di kelas ataupun di luar kelas.
2. Guru sebagai “penyuluh” yang bertugas membantu murid agar mampu mengarahkan dan menyesuaikan diri pada lingkungan hidupnya. Ini berarti bahwa guru hendaknya mampu membantu individu untuk mengubah dan memecahkan masalah yang dihadapi murid melalui proses hubungan interpersonal. Kehidupan nyata di sekolah menuntut guru untuk mengetahui dan memahami proses penyuluhan.
3. Guru sebagai “action researcher” yang mengkhususkan diri dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran siswa.

Sedangkan Rochman Natawijaya (1988 : 31-32) mengemukakan sekurang-kurangnya ada tiga tugas pokok guru, yaitu :

1. Tugas profesional, yaitu tugas yang berkenaan dengan profesinya. Tugas ini mencakup tugas mendidik (mengembangkan pribadi siswa), mengajar (untuk mengembangkan intelektual siswa), dan mengelola ketertiban sekolah sebagai penunjang ketahanan sekolah.
2. Tugas manusiawi (human responsibility), yaitu tugas sebagai manusia. Dalam hal ini guru bertugas mewujudkan dirinya untuk ditempatkan dalam kegiatan kemanusiaan dan sesuai dengan martabat manusia.
3. Tugas kemasyarakatan (civic mission), yaitu tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dalam hal ini guru bertugas membimbing siswa menjadi warga negara yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN.

Walaupun dari ketiga tugas tersebut terpisah, namun dalam kegiatan belajar mengajar akan kelihatan terpadu. Dengan demikian guru tidaklah hanya sekedar menyampaikan materi, mencari dan menggunakan metode yang cocok, mengevaluasi hasil pekerjaan siswa, melainkan guru merupakan sosok pribadi, yaitu keseluruhan penampilan serta perwujudan dirinya dalam berinteraksi dengan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Bernar (Rochman Natawidjaya, 1988 : 32) mengatakan bahwa pribadi gurulah lebih dari apa yang diucapkan serta metoda yang digunakan, yang menentukan kadar dan arah pertumbuhan siswa.

Memotivasi siswa agar memiliki disiplin merupakan tugas pokok guru dalam pendidikan. Dalam hal ini Beanmont dan Macomber (1949 : 225)



mengemukakan bahwa salah satu ciri pokok pendidikan modern adalah memotivasi siswa agar dapat berdisiplin secara mandiri atau memiliki disiplin diri.

Penjelasan tentang guru memiliki kewajiban dalam mengembangkan disiplin diri siswa, seperti dikemukakan oleh Lindgren (1976 : 258), sebagai berikut :

“...they are generally agreed that children should learn how to discipline them selves and that grow up to become adults who are responsible, law abiding, considerate of the welfare of others, and able to carry on the important responsibilities of life in the face of frustration, tempting distractions and other difficulties”.

Dalam upaya mengembangkan disiplin siswa, seyogyanya guru membimbing siswa agar memiliki pemahaman tentang peraturan atau norma-norma dan dapat berperilaku sesuai dengan peraturan atau norma tersebut. Disamping itu guru menciptakan situasi komunikasi yang terbuka dengan siswa, dimana siswa dapat berdiskusi dengan guru dan dapat mengemukakan pendapat atau bertanya kepada guru.

Dalam rangka mengembangkan disiplin siswa, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian seorang guru, seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Natawidjaya (1984 : 124-125), adalah sebagai berikut :

a. Guru hendaknya menjadi model bagi siswa.

Guru berperilaku mencerminkan nilai moral, menjadi figur sentral bagi siswa dalam menterjemahkan nilai tersebut. Sebagai model berarti ia telah menterjemahkan nilai-nilai tersebut pada dirinya, seperti berlaku jujur, berdisiplin diri dalam melaksanakan tugas, bersikap optimis dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup.



- b. Guru hendaknya memahami dan menghargai pribadi siswa.
- 1) Guru hendaknya memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangan.
  - 2) Guru menghargai pendapat siswa.
  - 3) Guru hendaknya tidak mendominasi siswa.
  - 4) Guru hendaknya tidak mencemoohkan siswa jika nilai pelajarannya kurang.
  - 5) Guru memberikan pujian kepada siswa yang berperilaku atau berprestasi baik.
- c. Guru sebagai pembimbing bagi siswa.
- 1) Mengembangkan iklim kelas yang bebas dari keterangan dan yang bersuasana membantu perkembangan siswa.
  - 2) Memberikan informasi tentang cara-cara belajar yang efektif.
  - 3) Mengadakan dialog dengan siswa tentang tujuan dan manfaat peraturan belajar yang ditetapkan sekolah.
  - 4) Membantu siswa untuk mengembangkan kebiasaan belajar dengan baik.
  - 5) Membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar.
  - 6) Membantu siswa yang mengalami masalah terutama masalah belajar.
  - 7) Memberikan informasi tentang nilai-nilai yang berlaku dan mendorongnya agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Uraian di atas menjelaskan tentang berbagai upaya yang kondusif bagi pengembangan disiplin siswa. Yang menjadi permasalahan adalah apakah guru-guru telah menanamkan prinsip-prinsip penanaman disiplin yang memadai dalam

proses pendidikan di sekolah?. Hal ini tidak mudah dijawab, karena berkaitan erat dengan kecenderungan penanaman disiplin yang dilakukan oleh guru.

Kecenderungan penanaman disiplin itu pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yaitu : Otoriter, demokratis, dan laissez faire.

a. Otoriter.

1) Guru menetapkan peraturan tanpa kompromi

Dalam tipe ini guru menunjukkan perilaku seperti : Mendominasi atau menguasai siswa, menentukan dan mengatur kelakuan siswa, merasa berkuasa dan berhak memberikan perintah, larangan, atau hukuman (S. Nasution, 1983 : 130-132)

2) Guru menghukum siswa yang tidak mentaati peraturan.

Jika ada siswa yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan dengan tidak meminta penjelasan terlebih dahulu kepada siswa tersebut, guru langsung menghukumnya.

3) Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat atau meminta bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Perilaku yang muncul dari guru yang demikian misalnya tidak mau menerima keluhan siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama masalah belajar, menolak pendapat siswa.

b. Demokratis.

Guru yang bersifat demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Guru sering mengadakan dialog dengan siswa dalam menetapkan atau melaksanakan peraturan. Perilaku yang muncul dari guru tersebut seperti :

mau bekerja sama dengan siswa atas dasar perencanaan melalui musyawarah bersama, mendiskusikan tentang peraturan belajar yang akan ditetapkan, meminta penjelasan kepada siswa jika pada suatu saat siswa dipandang melanggar peraturan, memberikan pengertian mengenai manfaat peraturan yang diberikan.

- 2) Guru memberikan bantuan kepada siswa yang menghadapi masalah. Dalam hal ini guru memperhatikan atau menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi siswa.
- 3) Guru menghargai siswa. Perilaku yang muncul seperti : memperlakukan siswa sesuai dengan kemampuannya, memahami kelebihan dan kekurangan siswa, tidak mencemoohkan siswa bila suatu saat siswa membuat kekeliruan.
- 4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. Perilaku yang muncul seperti : guru menerima pendapat siswa, guru merespon pertanyaan siswa tentang sesuatu yang belum dipahaminya.

c. *Laissez Feire*, Ciri-cirinya :

- 1) Guru bersikap acuh tak acuh terhadap kepentingan siswa, seperti : guru bersikap masa bodoh terhadap siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, guru kurang memperhatikan kegiatan belajar siswa, guru kurang memperhatikan apakah siswa memahami cara-cara belajar yang baik.
- 2) Pengawasan guru bersikap longgar, yaitu guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengontrol perilakunya sendiri.

Elizabeth B. Hurlock (1990 : 93) mengemukakan bahwa ada tiga cara dalam menanamkan disiplin pada anak, yaitu :

1. Cara mendisiplinkan otoriter, yaitu dilandasi dengan peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksakan perilaku yang diinginkan. Tekniknya mencakup hukuman yang berat bila terjadi kegagalan dalam memenuhi standar peraturan dan tidak ada penghargaan pada anak yang memenuhi standar yang diharapkan. Disiplin otoriter berkisar antara pengendalian perilaku anak yang wajar hingga perilaku yang tidak memberikan kebebasan bertindak, kecuali dengan standar yang ditentukan. Disiplin otoriter selalu mengendalikan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman, terutama hukuman badan.
2. Cara mendisiplinkan permisif, dimana biasanya disiplin permisif tidak membimbing anak ke pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan hukuman. Di sini pendidik membiarkan anak-anak meraba-raba dalam situasi yang terlalu sulit untuk ditanggulangi oleh mereka sendiri, tanpa bimbingan atau pengendalian.
3. Cara mendisiplinkan demokratis, yaitu menggunakan penjelasan dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tersebut diharapkan. Cara ini lebih menekankan aspek edukatif dalam disiplin dari pada aspek hukuman.

Dari uraian di atas yang paling tepat dalam menerapkan disiplin adalah melalui disiplin demokratis, sebab dalam proses pendidikan siswa perlu mendapat bimbingan dari guru supaya perilaku yang muncul sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, tetapi siswa dalam proses mendisiplinkan tidak boleh ditekan sehingga siswa memiliki kebebasan dalam menentukan arahnya.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menanamkan disiplin pada siswa di sekolah, seperti dikemukakan oleh Sarbaini (1996 : 81), adalah sebagai berikut :

a. Contoh dan teladan.

Para guru patut menjadikan dirinya sebagai contoh norma sekolah, artinya tindakan atau perilakunya adalah perwujudan norma sekolah. Guru harus lebih dulu membiasakan norma sekolah dalam perilaku hidupnya sehari-hari.

b. Anjuran.

Anjuran adalah saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna, misalnya anjuran untuk tepat waktu masuk dan keluar sekolah.

c. Pemberitahuan.

Pemberitahuan adalah tindakan guru dalam memberi tahu pada peserta didik tentang perilakunya yang telah melakukan sesuatu yang melanggar peraturan dan dapat mengganggu atau menghambat jalannya proses pendidikan bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain yang ada di lingkungan atau kelompok tertentu. Pemberitahuan ini dilakukan karena siswa belum mengetahui norma yang melarang perilaku norma yang dikerjakannya.

d. Pembiasaan.

Pembiasaan adalah tindakan guru agar siswa melakukan sesuatu yang dikerjakannya berjalan dengan tertib dan teratur.

e. Penyardaran.

Penyardaran adalah tindakan guru terhadap siswa yang telah mulai kritis pemikirannya. Melalui penyardaran siswa sedikit demi sedikit diberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya diadakan norma-norma atau peraturan-peraturan.

f. Teguran.

Teguran adalah tindakan yang dilakukan guru terhadap siswa yang melakukan pelanggaran norma sekolah, misalnya pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Teguran diberikan guru pada siswa yang baru satu atau dua kali melakukan pelanggaran. Teguran bisa menggunakan kata-kata atau menggunakan isyarat seperti mata melotot atau menunjuk tangan.

g. Peringatan.

Peringatan adalah tindakan guru yang diberikan kepada siswa yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah beberapa kali diberikan teguran atas pelanggarannya terhadap norma sekolah. Dalam memberikan peringatan biasanya disertai dengan ancaman sanksi bila melanggar lagi.

h. Larangan.

Larangan sebenarnya mirip dengan perintah, namun konotasinya adalah keharusan untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan, seperti larangan ngobrol ketika sedang belajar atau guru sedang berbicara, larangan untuk berteman dengan siswa lain yang nakal. Larangan juga biasanya disertai dengan ancaman sanksi.



i. Ganjaran.

Ganjaran adalah tindakan guru yang bersifat menyenangkan baik bagi guru itu sendiri maupun peserta didik yang terkena ganjaran. Ganjaran diberikan oleh guru kepada siswa yang telah menunjukkan keberhasilan dalam sesuatu perbuatan.

j. Hukuman.

Hukuman adalah tindakan yang paling akhir apabila teguran dan peringatan tidak diperhatikan oleh siswa karena telah melakukan pelanggaran.

Berbagai tindakan dilakukan dalam upaya membina kedisiplinan siswa baik dalam konteks sekolah secara keseluruhan ataupun dalam kelas secara khusus. Dalam hal ini Crow (1953 : 174) mengemukakan berbagai tindakan pendisiplinan, dari bentuk hukuman badaniah hingga ke bentuk yang biasa dipakai sekarang, seperti bermusyawarah dengan anak, melepaskan anak dari situasi yang menggoda dan menggantinya dengan aktivitas lain yang disetujui, menuju perilaku yang diharapkan, memberikan kebebasan pada anak dalam aktivitasnya, dan menghilangkan dari posisi hak-hak istimewa. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pembinaan disiplin, tindakan-tindakan itu tidak terlepas dari kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan kewibawaan, kekuasaan, hukuman, dan ganjaran.

Elizabeth B. Hurlock (1972) memberikan rekomendasi tentang esensi dari hukuman yang baik, sebagai berikut :

- a. Hukuman harus disesuaikan dengan mengikuti sanksi (pelanggaran), sehingga anak akan mengasosiasikan keduanya. Jika seorang anak melemparkan makanan ke lantai karena marah, maka si anak tersebut disuruh segera membersihkannya kembali.

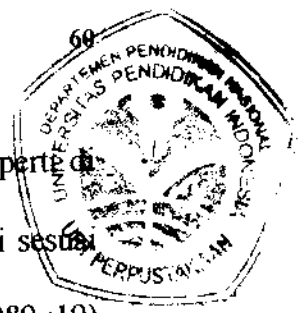
- b. Hukuman yang digunakan harus konsisten, sehingga si anak akan tahu bahwa kapan saja dia melanggar aturan, maka akan dikenakan hukuman.
- c. Hukuman yang digunakan tidak bersifat pribadi, sehingga si anak tidak menginterpretasikannya sebagai kekejian orang yang menghukum.
- d. Hukuman harus membangun tingkah laku yang secara sosial diterima pada masa-masa mendatang.
- e. Hukuman harus disertai dengan penjelasan tentang apa sebabnya hukuman diberikan, sehingga si anak menilainya secara adil dan penuh pemikiran.
- f. Hukuman mengarah pada pembentukan kepercayaan diri untuk menjamin kontrol tingkah laku yang lebih mendapat pelajaran pada masa yang akan datang.
- g. Hukuman tidak merendahkan (menghina) si anak dan jangan menimbulkan sakit hati (rasa dendam) dari si anak.

#### 4. Disiplin dalam Belajar.

Pengertian disiplin dalam belajar menurut A. Mappiare (1984 : 153) adalah

Kondisi dinamis yang mengandung kesanggupan, kebaikan dan kesungguhan belajar secara integral, yang timbul dari dalam dan dari luar, langsung dan tidak langsung dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pengajaran.

Siswa yang memiliki disiplin diri dalam belajar akan mampu mengatur dan mengarahkan segala aktivitas belajarnya, sesuai dengan tujuan belajar yang diharapkan. Tujuan tersebut menyangkut makna hasil belajar, yaitu ditandai dengan kemampuan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan dapat mengambil hikmahnya bagi peningkatan kualitas hidup. Dengan kata lain siswa diharapkan dapat mengambil makna hidup yang terjadi dalam dirinya sebagai hasil dari belajar.



Jika proses belajar telah dapat mengembangkan perilaku siswa seperti di atas, berarti siswa tersebut melalui proses belajar yang bermakna. Hal ini sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Noval dan Gowin (Ani Insani, 1989 :19) bahwa belajar bukan hanya meliputi perubahan perilaku, melainkan juga perubahan makna terhadap pengalaman (*change in the meaning of experience*).

Yang disiplin dalam belajar memiliki komitmen atau keterlibatan dalam belajar tersebut, karena memahami bahwa belajar itu sangat bermakna baginya. Sehubungan dengan hal tersebut Roger (Ani Insani, 1989 : 30) mengemukakan bahwa salah satu indikator kebermaknaan belajar adalah kualitas keterlibatan pribadi (*quality of personal involvement*). Didalamnya aspek kognitif dan afektif menyatu, berproses dalam peristiwa belajar yang sedang berlangsung.

Keterlibatan diri dalam belajar akan memberikan dampak yang positif bagi kelancaran belajar, seperti yang dikemukakan oleh Y. Singgih D. Gunarsa (1982 : 167) yaitu :

Adanya disiplin diri, terutama dalam hal belajar dan bekerja, akan memudahkan kelancaran belajar dan bekerja, karena adanya disiplin diri, maka rasa segan, rasa malas, rasa menentang dapat mudah diatasi, seolah-olah tidak ada rintangan maupun hambatan lainnya, yang menghalangi kelancaran bertindak.

Suatu hal yang tidak menguntungkan, bilamana disiplin diri siswa dalam belajar tidak berkembang dengan baik. Siswa yang tidak berdisiplin diri dalam belajar cenderung menampilkan perilaku yang dapat menghambat kelancaran belajar. Kecenderungan tersebut seperti kurang dapat mengatur dan mengarahkan diri dalam belajar, kurang konsisten dalam mentaati peraturan belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Wayson (1980 : 1) bahwa : *unfortunately in too many*

schools children do not exhibit self-discipline. They violate rules and display behavior that is not conducive to learning.

Sedangkan anak yang kurang memiliki disiplin diri (lack of self discipline) menunjukkan perilaku sebagai berikut :

- a. Dalam belajar kurang dapat memusatkan perhatian.
- b. Apa yang disampaikan mengenai materi pelajaran oleh guru sering lupa atau keliru.
- c. Sering menggunakan waktu untuk bermain, kurang memanfaatkan untuk belajar (mengerjakan tugas).
- d. Apabila diberi tugas kelompok sulit untuk bekerja sama.
- e. Sering menimbulkan keributan sehingga mengganggu siswa lain.

Sedangkan siswa yang memiliki disiplin diri akan menampilkan perilaku sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan belajar secara teratur.
- b. Menyelesaikan tugas-tugas pada waktunya.
- c. Mengikuti semua kegiatan belajar di sekolah.
- d. Memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru.
- e. Menghindari guru dari perbuatan-perbuatan yang menghambat kelancaran belajar.
- f. Membuat catatan pelajaran secara rapi dan teratur.
- g. Mentaati peraturan belajar yang dibuat oleh sekolah.

## 5. Penanaman Disiplin dalam Perkembangan Siswa.

Salah satu upaya pendidikan dalam mencapai tujuan dengan cara menanamkan disiplin kepada siswa. Penanaman disiplin perlu diberikan kepada siswa dengan cara memberikan pelajaran kepada mereka agar mentaati berbagai norma yang berlaku dalam kehidupan, baik yang bersumber dari agama maupun adat istiadat. Melalui penanaman disiplin diharapkan dapat berkembang suatu tatanan masyarakat yang bermoral, dan berperilaku sesuai dengan batasan norma tersebut. Penanaman disiplin diartikan sebagai upaya untuk :

- a. Membantu mengembangkan pribadi anak (siswa) yang sadar norma, maksudnya agar anak memahami batas norma, dan mampu berperilaku sesuai dengan batas norma tersebut. Dengan kata lain, siswa dapat mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Kemampuan mengendalikan diri, tidak akan terjadi apabila tidak ada kemauan, kebebasan memilih, dan kedewasaan. Jadi siswa yang telah mampu mengendalikan diri harus sudah memiliki ketiga karakteristik, sesuai yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa (1982 : 162-163) tentang pentingnya penanaman disiplin kepada siswa sebagai berikut :
  - 1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial, antara lain mengenal milik orang lain.
  - 2) Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk.
  - 3) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman.
  - 4) Mengorbankan kesenangan tanpa peringatan dari orang lain.

- b. Membantu siswa agar menyadari jati dirinya (self-identify) dan memiliki tanggung jawab (responsibility). Setelah siswa mengenal dan memahami norma-norma, maka siswa menyadari akan eksistensi dan posisinya. Siswa menyadari bahwa keberadaan dirinya sebagai makhluk yang mempunyai tanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan peraturan Allah.

Schneiders (1960 : 230) mengemukakan bahwa apabila siswa tidak ditanamkan disiplin, maka akan mengalami kegagalan dalam jati diri dan tanggung jawabnya.

- c. Membantu siswa dalam mengembangkan kata hatinya (conscience). Melalui penanaman disiplin, pada diri siswa terjadi internalisasi nilai, menyerap, mempertimbangkan dan menjiwai nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi rujukan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Elizabeth Hurlock (1956 : 420) adalah sebagai berikut :

Disciplin help the child to develop a conscience the internalized voice that directs him to do this or that. Pressures from adults over a priod of time become the pattern for the internalized voice of conscience to guide the child in making choices of his own.

Berkaitan dengan pernyataan internalisasi di atas Djamari (1997 : 49) mengemukakan sebagai berikut : Internalisasi biasanya dilakukan melalui pengalaman sosial, dimana berlangsung proses observasi, interaksi penghayatan dan akhirnya terjadi proses konseptualisasi nilai dan pengalamannya. Apabila



proses internalisasi tata tertib sekolah bisa terwujud dengan baik, akan mempercepat terwujudnya disiplin siswa di sekolah.

## **6. Disiplin Kerja Guru.**

Dalam kegiatan proses belajar mengajar, guru memegang peranan kunci yang sangat penting, yaitu menyediakan suatu kondisi yang memungkinkan kegiatan yang dilakukannya dapat menimbulkan aktivitas belajar siswa yang positif.

Berkaitan dengan masalah disiplin kerja guru Edward et.al (1961 : 565) mengemukakan : “Discipline can mean the way in which a teacher operates within the classroom, it can mean the individual to follow rules of producers that have been established, and it can mean punishment”.

Disiplin ditujukan kepada pembentukan tingkah laku yang sesuai dengan kontrol atas perkembangan kekuatan yang ada dalam diri, maupun perkembangan kekuatan diri setiap anggota organisasi. Penekanannya pada perwujudan tingkah laku, berupa kesanggupan untuk mentaati dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam organisasi kerja.

Dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja guru adalah suatu sikap mental yang dimiliki oleh guru, yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Disiplin kerja guru dapat mendorong aktivitas kerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya akan mencerminkan perilaku dalam melaksanakan tugasnya seperti :

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu.
- b. Bekerja dengan penuh kreatif dan inisiatif.
- c. Bekerja dengan jujur, penuh semangat dan tanggung jawab.
- d. Memelihara dan menggunakan fasilitas belajar mengajar dengan sebaik-baiknya

## **B. Konsep Moral.**

### **1. Pengertian Moral**

Mengenai konsep tentang moral banyak orang yang menafsirkan, sehingga sulit diperoleh kesepakatan akan makna esensialnya. Banyak beberapa penulis menggunakan istilah tersebut dengan bermacam-macam arti, hal ini menjadikan penjelasannya lebih kaya, tapi juga lebih menyulitkan dalam menafsirkannya. Pengertian moral secara harfiah seperti dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta (1984 : 204) adalah sesuatu tentang baik-buruk, benar-salah dan secara etimologi kata moral berasal dari bahasa Latin, *mores*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Mengenai pengertian moral menurut beberapa ahli, seperti dikemukakan oleh Sumarsono Moestoko (1981 : 3) yang menyatakan bahwa "Pengertian moral berarti kesanggupan manusia untuk memilih perbuatan dan sikap mana yang baik dan buruk, dapat pula memilih mana yang benar dan yang salah". Batasan lain dikemukakan oleh Frans Von Magnis

Suseno (1985 : 13) yaitu : “Moral adalah mengenai kewajiban manusia tentang yang baik dan buruk, yang benar dan salah”. Sedangkan menurut Piaget (A. Kosasih Djahiri, 1988 : 79) “moral adalah sejumlah keharusan-keharusan yang dituntut kepada seseorang atau kelompok tentang apa yang diyakini, dianut, dan dijalankan masyarakat dimana yang bersangkutan berada”. Poespoprojo (1986 : 102) memberikan batasan sebagai berikut :”Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruk, benar salahnya perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat”.

Disamping itu terdapat beberapa istilah yang mempunyai pertautan makna dengan kata moral, antara lain ; etika, susila, akhlak, budi pekerti, karakter, watak, dan kepribadian. Ada atau tidak adanya distingsi dari istilah-istilah tersebut, disini tidak dibicarakan. Etika merupakan salah satu kata yang sering dipertukarkan dengan kata moral. Kedua kata itu mempunyai arti yang hampir sama (sinonim) menurut etimologinya. Baik kata moral (mores) maupun kata etika (ethics) berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan atau tata cara hidup (Titus at all, 1984 : 141). Pendapat lain yang membedakan kata moral dengan etika dilihat dari segi edukatifnya. Moral merujuk kepada perilaku yang diharapkan, sementara etika merujuk kepada penjelasan tentang perilaku itu sendiri. Dengan kata lain etika adalah hal yang menunjukkan sifat manusia, sebagai ilmu akhlak, sebagai pengkajian sistem nilai yang ada pada diri manusia atau masyarakat (ilmu akhlak/filsafat moral), sedangkan moral adalah hal yang menunjukkan sikap akhlak

manusia (perbuatan yang dinilai) yang menjadi karakteristik jati diri manusia (Endang Sumantri, 1993 : 3)

Moral mengandung esensi : Interpersonal relationship and transactions (Robert M. Liebert, dalam Kosasih Djahiri, 1992 : 6). Menurut pengertian ini tersimpul makna bahwa moral memiliki dimensi personal-spiritual (transactional) dan interpersonal-social (interpersonal relationship). Maksudnya, orang bermoral adalah orang yang baik sebagai makhluk individu atau sebagai makhluk sosial. Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang menyatakan “morality is attitude of respect for persons and for the rules” (Jean Piaget, dalam Duska & Whelan, 1977 : 8).

Sedangkan Norman J. Bull (1983 : 3) memberikan pengertian yang lebih luas, ketika ia menyatakan bahwa moral berhubungan dengan “code of conduct in society” dan kedua berhubungan dengan “the pursuit of the good life”. Jadi menurut Bull, moral tidak saja bersifat heteronom, bahkan juga bersifat otonom.

Pada hakekatnya moral itu berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam berbuat dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku manusia ada yang baik ada pula yang salah. Sedang perilaku yang bermoral menurut Elizabeth B. Hurlock (1990 : 74) sebagai berikut :

“Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial, perilaku moral yang dikendalikan konsep-konsep moral, peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok”.

Sedangkan A. Kosasih Djahiri (1988 : 82) mengemukakan ciri-ciri insan bermoral, sebagai berikut :

1. Orang yang secara cermat memegang teguh acuan moral tertentu dan berbuat menurut acuan tersebut.
2. Orang yang tahu pasti apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan, mana yang benar dan yang salah.
3. Orang yang memiliki karakter dan kemauan kuat untuk berbuat benar.
4. Orang yang tahu benar apa yang harus atau seyogyanya dilakukan.
5. Bahwa pelaksanaan perbuatan yang benar (sub. 3) berlandaskan pertimbangan moral.

Agaknya definisi-definisi di atas masih bersifat 'mikro-kosmos', dalam arti melihat moral berdasarkan landasan atau prinsip-prinsip moral yang dibuat manusia. Ini tentu sangat tidak memadai bagi manusia yang religius seperti bangsa Indonesia yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia yang disebut moral atau perbuatan bermoral adalah sesuatu yang sesuai dengan norma-norma, logika, etika, estetika, dan agama (Kosasih Djahiri, 1992). Dengan demikian tersimpul pengertian bahwa moral berdimensi personal, sosial, kebangsaan, dan ketuhanan.

## **2. Pengertian Pendidikan Moral**

Adanya kesukaran-kesukaran dalam memberikan definisi moral, akan membawa kesulitan pula dalam merumuskan pengertian pendidikan moral. Bahkan kesulitan itu menjadi bertambah mengingat kata pendidikan itu sendiri memiliki arti yang amat luas. Itu sebabnya Wilson Skeptis berkata : "pendidikan moral adalah nama untuk sesuatu yang tidak jelas" (Wilson, dalam Cheppy, 1988 : 5). Pernyataan Wilson ini walaupun berlebih-lebihan, namun ada unsur benarnya juga terutama bila dikaitkan dengan praktek pendidikan. Hal ini pernah disadari



oleh John Dewey (1966/1916) ketika ia menyatakan bahwa pelajaran moral hendaknya terpatri dan terintegrasi (Embodied and integrated) berbagai (semua) pengalaman belajar.

Berdasarkan pandangan pelopor pendidikan progresif itu, menjadi tidak adil bila misalnya 'kegiatan A' disebut pendidikan moral, sementara 'kegiatan B' tidak ; padahal kedua kegiatan itu merujuk kepada pendidikan. Jadi pada hakekatnya, pendidikan moral itu tidak saja bersifat predefined, melainkan harus dilihat dari kontribusinya dalam membentuk sikap moral. Namun demikian kita dapat mengatakan bahwa pendidikan moral itu dapat dibedakan menurut tekanan-tekanan, misalnya ada pendidikan moral yang lebih menekankan pada pengetahuan atau intelektual, yakni yang lazim disebut 'pendidikan melek moral', ada pula yang lebih menekankan pada pembentukan watak dan karakter (moral karakter).

Pendidikan itu sendiri merupakan konsep yang di dalamnya sudah mengandung dimensi moral. Sebagai dipahami bahwa pendidikan tidak hanya transformasi pengetahuan dan keterampilan, bahkan juga upaya mewariskan nilai-nilai dan pembentukan sikap kepribadian. Sesuatu kegiatan baru dapat dikatakan pendidikan apabila didalamnya terjadi 'proses' yang mencakup tiga dimensi tadi. Proses itu harus dilihat secara 'moral', dan tidak parsial, sebab pendidikan adalah suatu proses yang bertahap dan berkesinambungan.

Terkait dengan penjelasan di atas, M.I. Sulaeman (1988) mengatakan : "pendidikan harus dilihat bukan saja dari tindakannya", melainkan juga dari 'makna' yang terkandung dibalik tindakan itu". Pemahaman seperti itu akan



membantu kita dalam menilai dimensi moral dalam suatu tindakan pendidikan. Misalnya : Kalau seorang guru hanya menyampaikan “ $2 \times 2 = 4$ ”, maka ia hanya berbicara tentang fakta. Supaya pesan itu berdimensi moral, maka guru tersebut perlu menjelaskan lebih jauh apa makna  $2 \times 2 = 4$  tersebut dalam kehidupan, apakah dalam bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

Beberapa ahli mencoba mengemukakan tentang pendidikan moral, seperti

S. Nasution mengatakan bahwa :

“Pendidikan moral ialah pendidikan yang berkenaan dengan pertanyaan yang benar dan yang salah dalam hubungan interpersonal antara manusia dengan manusia lainnya, yang meliputi konsep-konsep seperti harkat manusia, harga manusia, keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama manusia, kesamaan hak, sikap saling menghargai dan sebagainya”.

Tujuan pendidikan moral adalah membantu siswa agar “memiliki kepribadian dan prinsip yang mantap dan memasyarakat dengan disertai pengalaman pelakonan afektual dan keterampilan serta kepekaan yang responsif, sehingga mampu melakukan ‘taking position yang layak’ (Kosasih Djahiri, 1998 : 65)

Dalam pelaksanaan pendidikan moral atau etik Keller dan Reuss menegaskan ada empat prinsip yang mendasari moral atau etik tersebut, antara lain :

1. Prinsip justifikasi yang mengimplikasikan adanya kepentingan untuk menjustifikasikan pelbagai tindakan yang menarik perhatian kita.
2. Prinsip kejujuran yang menjamin keseimbangan secara adil dalam mendistribusikan pelbagai usaha dan pengorbanan.

3. Prinsip konsekwensi yang mengandung implikasi bahwa setiap orang harus mengantisipasi konsekwensi dari tindakan atau kelalaiannya.
4. Prinsip universalitas yang berimplikasi adanya konsistensi dalam pertimbangan dan kehendak untuk mengambil peranan dari pribadi-pribadi yang menarik.

Keempat prinsip tersebut harus diaplikasikan dalam refleksi moral dalam proses pengambilan keputusan. Secara bersama-sama keempat prinsip tersebut mengarahkan kepada suatu otonomi dalam artian adanya kebebasan mengekspresikan kebutuhan dan kepentingan serta rasa hormat kepada orang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral adalah proses atau upaya untuk memberi makna pada fakta, cara-cara (means) dan tujuan akhir (ends), yang mencakup aspek kognitif, affektif dan psikomotorik (konatif) bertahap atau sekaligus. Dan, pemaknaan itu memberi pengaruh mental psikologis pada anak didik (maupun juga guru), sehingga mereka dapat menampilkan dirinya sesuai dengan kehendak norma-norma moral yang berlaku. Bagi bangsa Indonesia norma-norma moral yang dimaksud adalah Pancasila dengan segala peristiwanya.

### **3. Perspektif Pendekatan Pendidikan Moral.**

Sudah banyak teori-teori yang berbicara tentang pendidikan moral, dan tentu saja teori-teori itu diturunkan dari filsafat pendidikan yang masing-masing bergerak dari asumsi tersendiri. Sayangnya, setiap teori itu, selain menjanjikan harapan, didalamnya juga mengandung cacat ontologis yang kadang-kadang cukup mendasar.

Teori 'sosialisasi moral' dari Durkheim (1859-1917) misalnya, praktis sangat menekankan pada 'norma-norma kolektif' sehingga kurang berbicara mengenai moral otonom agaknya, Durkheim terlalu berpegang pada konvensi masyarakat, padahal sejarah telah mencatat bahwa masyarakat tidak selamanya dapat dijadikan norma acuan norma yang absolut. Sebaliknya teori 'progresif' dari kubu John Dewey (1859-1952), cenderung bersifat 'pemisif' karena terlalu mengandalkan pengalaman dunia anak itu sendiri.

Sejumlah teori-teori belajar yang konon dipormulasikan secara empirik juga tidak luput dari kelemahan. Teori "behavioristik" dari kubu Skinner, rasanya tidak layak disebut teorinya pendidikan. Sebab, selain menolak manusia sebagai makhluk yang bebas dan berkesadaran, juga menawarkan cara-cara yang kurang manusiawi adalah patut dipertanyakan jika, manipulasi, conditioning, control, dan shaping, ditujukan untuk bidang moralitas, sungguhpun dengan rasionalisasi yang cukup baik.

Teori kognitif dari kubu Kohlberg, paling-paling hanya cocok untuk usia dewasa. Jika diterapkan untuk pendidikan rendah hanya terbatas pada studi tertentu dan itupun harus ditopang oleh guru-guru yang benar-benar matang. Sementara teori "humanistik" dari kubu Maslow, dan dikembangkan oleh Hofmann (1983) yang lebih menekankan pada segi afektif, seperti perlunya empathy, resiprositas, dan sentuhan-sentuhan manusiawi, agaknya akan terlalu mahal bila diterapkan dalam seting sekolah. Mengingat sekolah bukan saja tidak dapat, melainkan pula tidak harus menghapus sepenuhnya apa yang dituduh oleh

kubu romantisme kepadanya. Sekolah adalah sekolah, formalisme dan birokrasi adalah bagian dari sistem dan strukturnya.

Selanjutnya, apakah kita harus berputus asa? Jawabannya paling tidak tergantung kepada apa yang kita konsepsikan sebagai pendidikan, dan lebih khusus lagi apa yang kita maksud dengan pendidikan sekolah. Disini berarti bahwa kita harus dengan sedikit terpaksa memperkecil harapan kita terhadap sekolah. Ada baiknya dipertimbangkan pula pernyataan William Kay (1975), "no one morality, by school". Dan akan lebih baik lagi bila kita mengingat cerita Sokrates, ketika ia ditentang oleh muridnya Meno : Katakan wahai Sokrates, dapatkah kebajikan itu diajarkan? Tentu saja, kutipan-kutipan di atas yang memang sengaja dikutip dalam konteks ini perlu dicermati maknanya. Maksudnya pendidikan moral bukanlah suatu upaya yang mustahil, melainkan ia lebih merupakan aktivitas yang sangat menuntut adanya kesungguhan, baik dari peserta didik maupun pendidik.

Dengan demikian pernyataan di atas membawa implikasi yang mendasar bagi pendidikan moral di sekolah. Bagaimanapun sekolah bukan terminal yang pertama dan terakhir. Apa yang dapat dilakukan oleh guru-guru di sekolah, terlebih-lebih dalam konteks sekolah seperti sekarang ini, tidak ubahnya ibarat pertolongan semangkuk air kepada seorang musafir yang kehausan. Mungkin nilai upaya kita sebagai guru kecil, tetapi tanpa itu niscaya si musafir sulit melanjutkan perjalanannya. Maka yang jadi ukuran, bukan semata-mata memberi air, melainkan air apa yang diberikan pada musafir itu, dan dengan cara bagaimana memberikannya?. Barangkali dengan sedikit air yang kita berikan dengan sepenuh

hati sambil berdo'a niscaya kita telah mengantarkan si musafir ke tempat tujuannya. Perkara nanti si musafir dirampok di tengah jalan atau ia sendiri berbelot haluan, itu bukan kesalahan kita.

Jadi citra terhadap sekolah beserta guru-gurunya amatlah penting, mesti ada kesadaran jika pengetahuan mungkin ditransfer, skill relatif mudah dilatih, namun moralitas lain halnya. Atas dasar itu, berbicara mengenai upaya pendidikan nilai moral di sekolah, disamping seperti biasa kita mencoba melihat teori-teori mutakhir, ada baiknya kita mencoba membuka buku-buku klasik. Memang apa yang kita peroleh dari sumber klasik itu lebih bersifat spekulatif-intuitif, namun tidak apa sebab yang demikian kadang-kadang lebih afdol. Apa lagi kita tahu bahwa pendidikan tidak harus sepenuhnya tunduk kepada empirik.

Bagi Aristoteles, (referensi Aristoteles diperoleh dari beberapa sumber sekunder, antara lain : Peters, 1981; Bowen & Hobson, 1987; Bull, 1989; Kurtines & Gewirtz, 1984), apa yang kita konsepsikan sebagai moral itu ternyata merupakan satu sisi dari dua sisi menuju atau mencapai kebajikan (virtues). Sisi yang satu lagi adalah intellect. Tentu saat Aristoteles belum ada istilah kognitif, afektif, sebab istilah itu diformulasikan kemudian. Namun dengan sedikit improvisasi, kita dapat mengatakan bahwa dalam konsep Aristoteles, kebajikan (virtues) itu memerlukan paduan antara kognitif dan afektif.

Aristoteles berkata : “.....being by just doing just, temperate by doing temperate.....”. Maksudnya, apa yang disebut baik, benar, adil, wajar tidak hanya difikirkan, melainkan pula harus ditampakkan dalam perilaku yang nyata. Seperti halnya Plato, Aristoteles juga membenarkan bahwa intellect karena bersifat ide



tidak mesti tampak dalam realitas. Tetapi yang namanya character itu mesti dibiasakan, yakni melalui habituasi.

Sepertinya, Aristoteles membedakan antara pendidikan nilai dengan pendidikan moral. Dengan begitu nilai tidak hanya dicapai melalui habituasi maupun interaksi interpersonal, tidak juga merupakan sesuatu yang ditransmisikan, melainkan juga melalui spekulasi dan refleksi filosofis. Tentu, filsafat bagi Aristoteles tidak sama dengan filsafat formal seperti yang dikonsepsikan oleh sementara orang, melainkan filsafat sebagai 'the tools of thinking'.

Lebih jauh Aristoteles, sumber dari intelek itu bukan semata dari manusia (otoritas), melainkan pengetahuan (the truth). Dan pengetahuan menurut Aristoteles adalah bersifat intrinsik (end in itself : baik dalam dirinya). Maka siapa yang ingin baik (dalam artian intelek), ia harus memiliki pengetahuan itu. Sedangkan cara memperoleh pengetahuan disebut pendidikan. Dengan demikian konsep pendidikan bagi Aristoteles bersifat liberal, bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohnya, dari ketidaktahuannya. Itu sebabnya Aristoteles selalu merujuk kepada 'the free man'. Aristoteles menunjuk filsafat (etika), matematika, logika, dan seni (the art) sebagai pilar-pilar pengetahuan. Filsafat membantu manusia memahami arti hidup, mengasah pikiran supaya kritis, sehingga dapat membedakan apa yang baik, adil, bijaksana dengan yang sebaliknya. Matematika dan logika membantu menjernihkan fikiran supaya logis dan benar. Seni memungkinkan manusia menjadi harmoni dan estetis. Jika ketiga hal itu dapat dipadukan dengan baik, niscaya munculah pribadi yang etis, logis,



dan estetis. Perlu dicatat bahwa Aristoteles tidak pernah mereduksikan pendidikan sebagai sekolah.

Perlu dipahami bahwa Aristoteles tidak hanya memakai konsep pendidikan, namun juga 'training'. Jika intelek seperti dijelaskan di atas dapat dicapai dengan pendidikan, maka watak atau karakter memerlukan training atau habituasi. Bila pendidikan intelek dalam arti yang sesungguhnya baru dapat dicapai setelah dewasa, maka training atau habituasi karakter harus dimulai sejak dini. Maka Aristoteles telah mengkonsepsikan apa yang kemudian dibenarkan secara psikologis, bahwa : *apa yang seharusnya, namun tidak dilakukan di waktu kecil, akan menjadi sulit jika hal itu dipaksakan setelah dewasa*. Jadi watak itu harus ditumbuhkan sejak masa kecil. Bila kita menghendaki agar anak itu disiplin, taat, bersih, jujur, sopan, adil, hormat, berbudi harus dibiasakan sejak masa-masa awal. Sedangkan apa makna dari semua itu baru akan mereka pahami kemudian. Itulah sebabnya kemudian hari Hopkins mengatakan : *pendidikan dalam arti sebenarnya adalah pendidikan setelah dewasa*. Hal itu berarti bahwa pendidikan, terlebih-lebih pendidikan moral tidak pernah mengenal titik impas

Tentu, kita dapat menarik banyak implikasi dari konsepsi filsuf besar yang juga disebut guru pertama itu. Pertama, Aristoteles tidak meletakkan dikhotomis dalam pendidikan moral. Seperti juga John Dewey, Aristoteles telah lebih dulu memandang bahwa substansi moral itu hendaknya "embodied and integrated" dalam berbagai pengalaman belajar. Namun berbeda dengan Dewey yang berprinsip bahwa moral itu harus within bukan without, Aristoteles justru memandang bahwa moral itu perlu ditransmisikan melalui habituasi. Dengan kata

lain konteent moral itu bersifat objektif, karena itu perlu diwarisi. Kedua, dengan merujuk Aristoteles, kita dapat menjembatani konflik antara moral heteronom dan moral otonom. Istilah ini dipormulasikan pertama kali oleh Immanuel Kant (1724-1804) seperti yang banyak dipolemikkan dewasa ini. Bahwa moral heteronom itu perlu, tidak sebagai tujuan, melainkan sebagai batu loncatan menuju moral otonom. Seperti dibuktikan oleh Piaget (1935), Bull (1969), maupun Kholberg (1984) bahwa moral heteronom mesti didahului oleh moral otonom. Bahwa blind obedient, good-boy, nice-girl. Istilah-istilah ini dari Kholberg itu perlu. Sama halnya dengan disiplin, konformis terhadap norma-norma kolektif seperti dikehendaki Durkheim merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh pendidikan moral. Demikian juga, indoktrinasi dalam batas-batas yang wajar bukan hanya boleh melainkan juga perlu, jika tidak, kita tidak punya cara lain untuk memperkenalkan anak kepada sistem nilai budaya politik religius dari masyarakat dan bangsanya. Yang harus disadari bahwa insan yang bermoral tidak dapat muncul dari doktrin-doktrin, walaupun muncul hanya dalam dua corak : Jika tidak hipokrit, ya patuh buta !.

Berikutnya, apa implikasi pandangan Aristoteles terhadap pendidikan moral di sekolah ? Pertama, dengan sedikit berhati-hati, kita dapat mengatakan bahwa sekolah bukanlah tempat mencetak insan yang bermoral secara otonom. Jikapun kehendak itu dipaksakan, ia tetap merupakan harapan. Sebagaimana sekolah sukar mencetak ahli yang siap pakai, terlebih-lebih lagi sekolah juga tidak mampu melahirkan manusia yang siap secara moral. Seperti halnya rumah tangga, sekolah harus dipandang dan ditetapkan sebagai salah satu pranata yang cukup

strategis dalam mendidik moral. Kedua lembaga itu (rumah tangga dan sekolah) harus saling bahu membahu, tidak boleh yang satu melimpahkan pada yang lain, ada peran-peran khusus yang memang harus dilakukan oleh mereka masing-masing. Seperti ditunjukkan oleh sosiolog Coleman (1989) "Sekolah tidak pernah dapat sepenuhnya menggantikan peran-peran yang bersifat khusus yang memang harus dimainkan oleh keluarga. Dan kalau hal itu dipaksakan, yang muncul adalah sebuah kekeliruan". Karena itu, adalah keliru, atau setidaknya tidak fair, jika ada pihak yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab moral kepada sekolah. Namun ini sama sekali tidak berarti guru harus bertepuk tangan. Kedua, apa yang kita konsepsikan sebagai teaching (proses belajar mengajar) di kelas sesungguhnya merupakan rentetan dari upaya kita dalam membina moral. Yang dapat dilakukan melalui teaching apapun kecanggihan metodenya masih terbatas kepada pengetahuan moral. Supaya pengetahuan itu dapat disosialisasikan dan diinternalisasikan maka ia harus dilanjutkan dengan upaya-upaya yang lain. Namun teaching itu diperlukan supaya anak melek moral, dan melek moral adalah sebahagian dari pendidikan moral.

Akhirnya bagaimanapun, ide Aristoteles masih berupa sebuah konsep. Penerapannya, tentu harus dikembangkan sesuai dengan konteks situasional yang mencerminkan kondisi objektif suatu bangsa yang religius, kita harus memberi beberapa catatan terhadap konsepsi Aristoteles yang cosmocentris itu. Maka kita harus memberi bumbu bahwa insan yang bermoral yang dituju bukan semata etis, logis dan estetis, melainkan juga religius. Nilai atau norma moral religius harus dijadikan sandaran moral tertinggi, memayungi nilai-nilai dan norma-norma yang

berkembang dalam gatra kehidupan lainnya. Bahwa intelek yang hanya bersandar kepada the truth (bagaimanapun juga produk manusia) tidaklah cukup. Ia harus ditopang oleh nilai-nilai keagamaan yang super natural dan absolut. Itulah sebabnya, kita memberi perhatian khusus terhadap bidang studi Pendidikan agama dan Pancasila bukan dalam artian moral semata-mata menjadi kapling dari bidang studi tersebut, melainkan melalui studi itu diharapkan akan ditanamkan nilai-nilai yang tidak dapat atau tidak sempat ditanamkan melalui bahan ajar lainnya.

Akan tetapi, masalahnya tidak dapat terpecahkan secara sistemik dan konseptual, melainkan terpulang kepada pihak-pihak yang berkecimpung langsung dengan anak didik. Ini berarti, jika di rumah tangga harapan kita orang tua, di sekolah andalan kita adalah guru. Istilah guru harus ditafsirkan dan dimengerti sebagaimana mestinya, sebab dalam konsepsi pendidikan kita (paling tidak menurut pemahaman penulis) guru adalah berbeda dengan teacher. Maksudnya, tugas dan peran guru tidak semata mentransper pengetahuan dan melatih skill, tetapi juga yang lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai dan membina sikap kepribadian. Bila pengetahuan dan skill dapat dilakukan dengan mengajar yang sifatnya formal, maka yang disebutkan terakhir menuntut kerja keras yang lebih dari itu.

Seperti dibuktikan oleh Buber (1985), bahwa moralitas itu terbina melalui interaksi yang dialogis. Harus ada kedekatan antara I and Thou. Buber juga menyatakan bahwa seorang pendidik moral itu tidak perlu genius melainkan manusia biasa, hanya saja memiliki rasa kebersamaan terhadap orang-orang yang mereka hadapi. Seperti juga dicatat oleh kubu humanistik : “tidak ada moral tanpa

cinta". Tetapi cinta dimaksud bukan sublimasi libido, melainkan bentuk cinta seperti dilukiskan Eric Fromm (1947), "Cinta adalah suatu keadaan dimana diterima dan diperlakukan sepenuhnya". Maka cinta seorang guru kepada murid berarti memperlakukan mereka sepenuhnya, bukan hubungan itu hanya merupakan panggilan tugas secara formal. Yang menjadi masalah, dapatkah guru-guru sekarang menampilkan perannya seperti itu ? Adakah guru menaruh perhatian terhadap hal-hal yang pada biasanya tidak ditanyakan dalam ujian ? Di luar kegiatan rutin dan formal yang memang menjadi tugasnya, masih adakah kesempatan bagi guru untuk berkomunikasi dengan anak-anak didik yang memang masih membutuhkan didikan dan binaan itu ? Atau, apakah barangkali hal yang demikian sudah kadaluarsa ?

#### **4. Profil Guru Pendidikan Moral.**

Dalam pelaksanaan program pendidikan guru merupakan salah satu aspek yang penting untuk mencapai keberhasilan belajar. Menurut Waller (Kay, 1975 : 298) guru harus menerima bahwa dirinya itu sebagai pendidik moral, apakah itu ditunjukkannya melalui etos sekolah atau melalui pendidikan-pendidikan moral secara lahiriah. Sedangkan Alan Haris (1976) menyatakan bahwa kewenangan guru harus ditujukan pada pembinaan moralitas bersama-sama dengan guru mata pelajaran lainnya. Suatu hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi akademik siswa yang secara signifikan berbeda, bukan semata-mata merupakan hasil intelegensi secara individual, melainkan disebabkan karena perbedaan kualitas antar para gurunya.(Kay, 1975 : 301). Disamping itu William Kay (1975 :



198) mengatakan bahwa kedudukan guru sebagai pendidik moral paling tidak berlainan dengan peranan guru dalam : (1) bagaimana ia ikut menyelesaikan konflik nilai yang dihadapi oleh para siswanya, (2) bagaimana ia menampilkan kepribadiannya, (3) bagaimana ia memilih teknik dalam mengajarnya di dalam kelas, (4) bagaimana ia menjalin hubungannya dengan siswa, dan (5) bagaimana ia menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan para pelaku pendidikan dan orang tua siswa. Bila peran guru yang demikian penting tersebut ditarik pada moralitas agama, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nilai-nilai agama tersebut dapat dididikan guru kepada para siswa di sekolah, agar benar-benar terinternalisasikan sehingga mempribadi. Disamping itu guru harus memiliki profil tertentu, termasuk guru pendidikan moral. Menurut Durkheim profil guru pendidikan moral diantaranya :

- a. Harus memiliki beberapa kualitas pokok, seperti yang disebut dengan otoritas moral. Guru pendidikan moral sering kali dituntut untuk dapat menjadi simbol sekaligus contoh dari disiplin dan sanksi baik dalam upaya menjadikan dirinya sebagai lambang idola anak didiknya atau dalam rangka memenuhi tugasnya sehari-hari dalam mewujudkan tertib dan efisiensi.
- b. Harus memiliki totalitas dalam berusaha. Mengajar bukanlah sekedar mentransmisikan fakta atau berita kecil yang terisolasi, akan tetapi mengajar lebih merupakan aktivitas yang organis dan sintesis. Dalam mengajar perlu diperhatikan totalitas kepribadian peserta didik secara lebih fundamental.
- c. Memiliki eksplikasi dan kejelasan guru di dalam melakukan analisis pekerjaan.



Sama dengan Durkheim, John Wilson juga menempatkan guru sebagai figur sentral dalam pendekatan pendidikan moralnya. Peranan esensial guru, menurut Wilson, adalah membantu pengembangan komponen moral dalam diri peserta didiknya. Untuk dapat memenuhi fungsi tersebut, setiap guru paling tidak harus memiliki pengetahuan filsafat tentang landasan teoritik dari komponen komponen moral sekaligus kemampuan untuk mewujudkannya dalam proses belajar mengajar.

Disamping memiliki kemampuan seperti yang telah diutarakan di atas, guru mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas guru tersebut oleh Kohlberg dirinci kedalam empat macam tugas yaitu :

- a. Guru harus membantu peserta didik dalam memfokuskan pandangannya, terutama dalam menyikapi konflik-konflik moral yang sebenarnya.
- b. Guru mesti membantu peserta didiknya dalam merefleksi alternatif cara menalar konflik moral sekaligus pemecahannya. Fungsi ini melibatkan juga kewajiban guru untuk membentuk peserta didiknya dalam proses pertimbangan moral terutama dalam kaitannya dengan proses reflektif moral.
- c. Guru mesti membantu peserta didik dalam merefleksi secara kritis dalam proses berfikir yang mereka lakukan.
- d. Guru mesti memberikan saran kepada peserta didiknya mengenai prosedur refleksi dan cara-cara pemecahan yang lebih efisien dibanding apa yang sudah dikembangkan peserta didik sebelumnya. Disini fungsi guru memberikan peluang peserta didiknya untuk meningkatkan tahap perkembangan moralnya paling tidak satu tingkat lebih tinggi ketimbang sebelumnya.

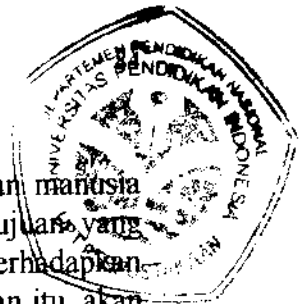
## 5. Keterkaitan Pendidikan Moral Dengan Pendidikan Umum

Pendidikan umum lahir disebabkan karena adanya over spesialisasi dari suatu program studi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan semakin menipis dan menimbulkan arogansi dari salah satu program studi. Pendidikan Umum menekankan pentingnya pengembangan nilai-nilai moral sebagai basis pengembangan kepribadian, namun Pendidikan Umumpun tidak mengabaikan pentingnya nilai-nilai intelektual. Hal itu berarti Pendidikan Umum (General Education) berpegang pada terminologi kunci, “manusia utuh” yang meliputi manusia, dari manusia yang sangat belia sampai kepada manusia tua, yang diberikan melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah (Nursid Sumaatmadja, 1990 : 26).

T.R. Mc Connel (1952 : 4) mengemukakan bahwa : “Pendidikan Umum adalah pendidikan yang mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, memperoleh dasar hidup yang cukup kuat, serta pandangan hidup yang luas, sehingga sadar, bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat serta lingkungannya”.

Phillip H. Phenix (1964 : 5) mengemukakan bahwa “general education is the process of engendering essential meaning”, yang berarti bahwa setiap manusia perlu memahami pemaknaan nilai yang esensi dan diperlukan bagi pembentukan dirinya sebagai manusia yang memiliki kepribadian utuh, terpadu, dan menyeluruh (whole person)

Adapun pengertian manusia utuh menurut MD. Dahlan (1988 : 14) sebagai berikut :



“ Manusia utuh menurut pandangan yang tuntas mencerminkan manusia kaffah, dalam arti satunya niat, ucap, fikir, perilaku, dan tujuan yang direalisasikan dalam hidup bermasyarakat. Dan itu semua diperhadapkan kepada Allah SWT. Satunya niat, ucap, fikir, perilaku dan tujuan itu, akan membebaskan manusia dari konflik diri yang akan mengarah kepada kepribadian terbelah. Manusia kaffah dalam kehidupan masyarakat bagaimanapun tidak akan terbawa-bawa dan terpengaruh oleh hasutan apapun. “

Dalam pandangan Phenix (Nursid Sumaatmadja, 2002 : 109-110) ada enam makna esensi yang melekat dalam setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keenam makna tersebut antara lain :

**Makna Simbolik**, meliputi : Bahasa, matematika, termasuk juga isyarat-isyarat, upacara-upacara, tanda-tanda kebesaran, dan sebagainya. Makna simbolik ini sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya manusia. **Makna empirik**, mencakup ilmu-ilmu kealaman, hayati, kemanusiaan. Makna empirik ini mengembangkan kemampuan teoritik, konseptual, analitik, generalisasi berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang dapat diamati. **Makna estetik**, meliputi berbagai seni, seperti musik, karya seni, kesenian, sastra dan sebagainya. Kedalam kawasan makna estetik ini, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan keindahan dan kehalusan, keunikan menurut persepsi subjektif berjiwa seni. **Makna sinoetik**, berkenaan dengan perasaan, kesan, penghayatan, dan kesadaran yang mendalam. Kedalam makna ini termasuk empati, simpati dan sebangsanya. **Makna etik**, berkenaan dengan aspek-aspek moral, akhlak, perilaku yang luhur, tanggung jawab dan sebagainya. **Makna sinoptik**, berkenaan dengan pengertian-pengertian yang terpadu dan mendalam seperti agama, filsafat, pengetahuan sejarah yang menurut nalar masa lampau, dan hal-hal yang bernuansa spiritual.

Tujuan pendidikan umum yang dikemukakan di atas yaitu menciptakan manusia yang utuh, dapat hidup dengan baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan negara, demokratis, serta bertanggung jawab sebagai warga negara, dapat memecahkan masalah pribadi dan masyarakat dengan baik.

Tujuan Pendidikan Umum menurut Nursid Sumaatmadja (1990 : 7) sebagai berikut :

**“Membebaskan manusia dari kebodohan, melepaskan manusia dari keterbelakangan, memanusiakan manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya, membina manusia mengenal dirinya sendiri, menyadarkan dirinya selaku individu dan selaku makhluk sosial, selaku warga negara, warga dunia, dan selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”.**

Sedangkan menurut Sikun Pribadi (1981 : 11) mengemukakan bahwa tujuan Pendidikan Umum antara lain :

1. **Membiasakan siswa berfikir objektif dan kritis.**
2. **Memberikan pandangan tentang berbagai jenis nilai hidup, seperti kebenaran, keindahan, dan kebaikan.**
3. **Menjadi manusia yang sadar akan dirinya, sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai pria dan wanita dan sebagai warga negara.**
4. **Mampu mengabdikan tugasnya bukan saja karena menguasai bidang profesinya, tetapi karena mampu mengadakan bimbingan dan hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya.**

Melalui pelaksanaan Pendidikan Umum diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, mengembangkan kemampuan dasar yang dimilikinya sehingga anak didik dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan sikap yang ditanamkan guru, sehingga nilai dan sikap menjadi dasar dalam pengembangan pribadinya.

Disamping tujuan, Pendidikan Umum memiliki asas, seperti dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja (2002 : 56-67) adalah sebagai berikut :

1. Asas pendidikan sepanjang hayat.
2. Asas kasih sayang.
3. Asas demokrasi.
4. Asas keterbukaan dan transparansi.
5. Asas tanggung jawab.
6. Asas kualitas.

Tujuan akhir yang hendak dicapai oleh pengembangan dan penerapan asas-asas pendidikan itu, tidak lain yaitu Sumber Daya Manusia yang manusiawi. Sosok manusia dalam hal ini manusia “ideal” yang diharapkan sebagai dambaan, yaitu manusia yang penuh kasih sayang, demokratis, terbuka, transparan dan memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap kehidupan di lingkungan manapun. Sosok manusia tersebut memancarkan manusia yang berkualitas, sehat jasmani-rohani, cerdas, tajam perasaan, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan pribadi yang dapat diterima oleh siapa saja serta dari kalangan apa saja. Bagi dunia pendidikan, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang demikian itu, merupakan panggilan yang sangat mulia. Namun demikian untuk melaksanakannya kita wajib menerapkan “analisis SWOT”, dimana letak kekuatan (strength), kelemahan (weekness), bagaimana peluangnya (opportunity), dan apa yang menjadi ancaman (threeth). Melalui analisis ini, kita harus berupaya menyusun perencanaan, perumusan tujuan, pemilihan materi, penentuan metode dan strategi, sampai pada evaluasinya. Dalam hal ini asas kualitas dan tanggung jawab harus tetap menjadi acuan (Nursid Sumaatmadja, 2002 : 69).

### **C. Metode Penerapan Disiplin dalam Pendidikan.**

Guru sebagai pendidik dalam prakteknya perlu memiliki metode yang tepat, karena metode itu merupakan pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan tujuan. Dalam tesis ini penulis mencoba memaparkan beberapa



metode yang berkaitan dengan penerapan disiplin di sekolah, seperti metode keteladanan, metode pembiasaan, metode ibrah dan mau'izah.

a. Metode keteladanan.

Secara alamiah siswa di sekolah memiliki kecenderungan untuk meneladani gurunya, hal ini telah diakui oleh ahli pendidikan baik dari Barat maupun dari Timur, karena secara psikologi anak memang senang meniru, tidak saja yang baik, bahkan yang jelekpun suka ditiru. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Tafsir (2001 : 143), adalah sebagai berikut :

Secara psikologi ternyata manusia memang memerlukan tokoh teladan dalam hidupnya, ini adalah sifat pembawaan. Taqlid (meniru) adalah salah satu sifat pembawaan manusia. Peneladanan itu ada dua macam, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Keteladanan yang tidak sengaja ialah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, sedangkan keteladanan yang disengaja ialah seperti memberikan contoh membaca yang baik, mengerjakan salat yang benar. Keteladanan yang disengaja ialah keteladanan yang memang disertai penjelasan atau perintah agar meneladani.

Dalam agama Islam satu-satunya yang harus menjadi teladan ialah Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam, hal ini seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahjab ayat 21 yang artinya :

Dan sesungguhnya Rasul Allah itu menjadi teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Tuhan dan hari kemudian dan yang mengingat Tuhan sebanyak-banyaknya. (QS. Al-Ahjab : 21)

b. Metode Pembiasaan

Pembiasaan adalah pengulangan, jika guru setiap masuk kelas mengucapkan salam itu telah dapat diartikan sebagai usaha pembiasaan dan bila murid masuk kelas tidak mengucapkan salam maka oleh gurunya harus ditegur



agar mengucapkannya. Metode pembiasaan cukup efektif dalam membina sikap mental manusia dan metode pembiasaan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh anak kecil saja, tapi orang dewasa pun bisa melakukannya, hal ini seperti dikemukakan oleh Ahmad Tafsir (2001 : 144) adalah sebagai berikut :

Ajaibnya pembiasaan tidak hanya perlu bagi anak-anak yang masih kecil, tidak hanya perlu di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, di Perguruan Tinggi pun pembiasaan perlu dilakukan. Pembiasaan merupakan metode pendidikan yang jitu, tetapi sayangnya kita tidak mampu menjelaskan mengapa pembiasaan itu amat besar pengaruhnya pada pembentukan pribadi seseorang. Ternyata pembiasaan tidak hanya mengenai yang batini, tetapi juga lahir. Orang yang biasa menyetir mobil lebih baik dari pada orang yang menguasai teorinya tapi jarang membawa mobil.

c. Metode ibrah dan mau'izah.

Ibrah berarti pelajaran, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pendidikan agar siswa atau warga belajar setelah mengikuti kegiatan belajar dengan melihat, mendengar, dan merasakan dapat mengambil hikmahnya atau makna yang dapat dijadikan pedoman atau tuntunan dalam hidup. Hal ini seperti dikemukakan oleh Al-Nahlawi dalam Ahmad Tafsir (2001 : 145) adalah sebagai berikut :

Ibrah ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, yang dihadapi dengan menggunakan nalar, yang menyebabkan hati mengakuinya.

Metode ini bisa menggunakan kisah yang terjadi, seperti kisah Nabi Muhammad SAW.

Pengertian mau'izah ialah nasehat yang lembut dan diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Tentang pengertian mau'izah Ahmad Tafsir (2001 : 145) lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut :

*Pertama* berarti nasihat, yaitu sajian bahasa tentang kebenaran dengan maksud mengajak orang yang dinasihati untuk mengamalkannya. Nasihat yang baik itu harus bersumber pada yang Maha baik, yaitu Allah. Yang menasihati harus lepas dari kepentingan-kepentingan dirinya secara bendawi dan duniawi, ia harus ikhlas karena semata menjalankan perintah Allah. Kedua mau'izah berarti tadzkir (peringatan). Yang memberi nasihat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasihat itu meninggalkan kesan, sehingga orang yang dinasihati tergerak untuk mengikuti nasihat itu. Sekarang kedua pengertian itu harus digabungkan, nasihat itu harus ikhlas dan disampaikan berulang-ulang.

Adapun nasehat yang dapat menggetarkan kalbu apabila nasehat tersebut memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Yang memberi nasehat merasa terlibat dalam isi nasihat itu, jadi ia dengan serius dalam memberi nasihat.
2. Yang menasihati harus merasa prihatin terhadap nasib orang yang dinasihati.
3. Yang menasihati harus ikhlas, artinya lepas dari kepentingan pribadi secara duniawi.
4. Yang memberi nasihat harus berulang-ulang melakukannya.